

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia merupakan tugas dan kewajiban pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa pemerintah Indonesia atau perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan serta bantuan hukum bagi warga negara Indonesia. Namun melihat dari kasus yang terjadi pada WNI yang berada di luar negeri, pemerintah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penggunaan pendekatan tersebut untuk mengetahui terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri selama ini. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999, Konvensi Internasional tentang Hubungan Diplomatik Antar Negara dan Peraturan Menteri tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel dan jurnal tentang Perlindungan warga negara Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 dan peraturan tersebut diatas mengatur tentang perlindungan warga negara Indonesia, namun melihat masih banyaknya kasus yang terjadi pada warga negara Indonesia yang menyalahgunakan dokumen ketika melakukan tindak pidana di luar negeri. Sehingga diperlukan upaya pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dan tentunya juga harus mengacu pada Konvensi Internasional yang telah di ratifikasi.

Kata Kunci : Warga Negara Indonesia, Perlindungan Hukum, Peraturan

ABSTRAK

Legal protection for Indonesian citizens is the responsibility and obligation of the government as set forth in Law Number 37 Year 1999 on Foreign Affairs that the Indonesian government or the representative of the Republic of Indonesia is obliged to provide shelter, protection and legal assistance for Indonesian citizens. But looking at those cases about Indonesian citizens who live abroad, the government does not perform its responsibility and obligation as regulated in legislation.

This research is normative research by using approach of legislation. Such approach is used to know about the legal protection provided by the state against the troubled Indonesian citizens abroad so far. The legal substance used is the primary legal material, namely Law Number 37 Year 1999, International Convention on Inter-State Diplomatic Relations and Ministerial Regulation on Citizen Service at Representative of the Republic of Indonesia Abroad. Secondary law materials are books, articles and journals on the protection of the state waraga Indonesia.

The result of the research shows that Law Number 37 Year 1999 and the above regulation regulate the protection of Indonesian citizens, but in the analysis during this time the country is paying less concern or less prioritize towards the protection of Indonesian citizens with problems abroad, so there is still a lot of Indonesian citizen who have problems abroad and has lack legal protection in accordance with what has been mandated in the legislation. It is therefore necessary to reform the legislation and must also refer to the ratification of the International Convention.

Keywords : Indonesian citizen, Legal Protection, Policy

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum	11
 BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENYALAHGUNAKAN DOKUMEN KETIKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI	 12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menyalahgunakan Dokumen Ketika Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri	 12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum dan Warga Negara Indonesia	 12
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	20
2.2 Warga Negara Indonesia Yang Menyalahgunakan Dokumen Ketika Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri	 21
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Dokumen Perjalanan	21
2.2.2 Yurisdiksi Terhadap Perlindungan Bagi Warga Negara Indonesia.....	 36

BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENYALAHGUNAKAN DOKUMEN KETIKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI ..	40
3.1 Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia	40
3.1.1 Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Peraturan Perundang-undangan	40
3.1.2 Perlindungan Warga Negara Indonesia Yang Menyalahgunakan Dokumen Ketika Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri	49
3.2 Warga Negara Indonesia Yang Menyalahgunakan Dokumen Ketika Melakukan Tindak Pidana Di luar Negeri	50
3.2.1 Ketentuan Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri	50
3.2.2 Ketidaktercukupan Aturan Hukum Terkait Perlindungan Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri	52
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
BIODATA PENULIS	60